

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 15, Agustus 2022

Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri **Hal. 1**

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi **Hal. 3**

Masihkah Diperlukan Reformasi dalam Tubuh Polri? **Hal. 5**



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Daftar Isi

Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri.....	1
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi	3
Masihkah Diperlukan Reformasi dalam Tubuh Polri?.....	5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Riza Aditya Syafri

Editor

Tio Riyono

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Meninjau Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri

HIGHLIGHT

- Saat ini jumlah WNI di luar negeri sudah mencapai 3,011 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan WNI dengan profesi sebagai pekerja migran.
- Pemerintah melalui Kemlu telah melakukan upaya terbaik melindungi WNI di luar negeri. Mulai dari pemberian fasilitas repatriasi sebanyak 73 ribu WNI hingga menyelamatkan hak keuangan WNI hingga mencapai total Rp179,3 miliar pada 2021.
- Kinerja perlindungan WNI menunjukkan peningkatan. Rata-rata persentase penyelesaian kasus WNI sudah mencapai 83,06% per tahun. Capaian indeks perlindungan WNI juga naik dengan rata-rata pertahun sudah mencapai 91,94%.
- Namun demikian, alokasi anggaran perlindungan WNI relatif lebih kecil. Untuk menangani satu kasus WNI hanya mendapat alokasi anggaran rata-rata Rp 3,1 juta per kasus. Hal ini menyisakan ribuan kasus (2.188 kasus) yang tidak tertangani oleh pemerintah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna

Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio

Riyono · Riza Aditya Syafri

Penulis: Mujiburrahman · Ade Nurul

Aida

Salah satu dari lima visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima. Visi tersebut sebagai pengejawantahan dari misi terbentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan (*preamble*) alinea keempat UUD 1945. Selain itu, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional Kemlu dalam RPJMN 2020-2024.

Hingga per Desember 2022, jumlah WNI di luar negeri mencapai 3,01 juta jiwa (Kemlu, 2021). Sebanyak 90% diantaranya merupakan WNI dengan profesi sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Sebanyak 10% sisanya merupakan pelajar dan anak buah kapal (ABK). Dengan jumlah WNI yang relatif cukup besar tersebut, maka program perlindungan WNI di luar negeri yang dimotori oleh Kemlu menjadi semakin penting dan prioritas.

Terdapat dua indikator penting yang dapat mengukur kinerja perlindungan WNI di luar negeri diantaranya capaian indeks perlindungan WNI di luar negeri dan persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana perkembangan kinerja perlindungan WNI di luar negeri dan dukungan anggarannya?

Program Perlindungan WNI 2021

Pemerintah melalui Kemlu terus melakukan upaya-upaya sistematis dan strategis untuk melindungi WNI di luar negeri dari tahun ke tahun. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan 2021, Kemlu telah memfasilitasi repatriasi lebih dari 73.000 WNI di luar negeri. Selain itu, Kemlu telah menyalurkan paket sembako sebanyak 24.000 untuk WNI terdampak Covid-19. Diplomasi perlindungan WNI telah membebaskan tujuh WNI dari hukuman mati, empat WNI dari penyanderaan serta menyelamatkan hak finansial WNI sebesar lebih dari Rp179,3 miliar.

Sebanyak 88.637 WNI yang tersebar di berbagai penjuru dunia telah difasilitasi vaksin oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 33 WNI berhasil dievakuasi dari Kabul Afghanistan di tengah risiko geopolitik yang tidak menentu. Pada tahun 2022, pemerintah telah memperkuat sistem perlindungan WNI termasuk dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun *norm setting* di level multilateral.

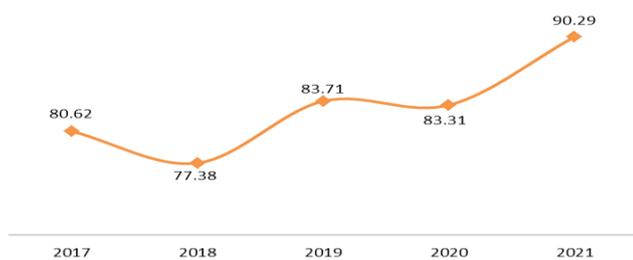
Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri Meningkat

Kinerja perlindungan WNI di Luar Negeri dapat dilihat dari dua indikator utama yaitu persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri dan capaian indeks perlindungan WNI di luar negeri. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu setengah dekade terakhir.

Penyelesaian kasus WNI di luar negeri meningkat cukup signifikan sejak tahun 2017. Naik dari 80,62% menjadi 90,29% pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2018 dan 2020 masing-masing 77,38% dan 83,31%, namun rata-rata penyelesaian

kasus WNI di luar negeri sudah mencapai 83,06% selama periode 2017-2021.

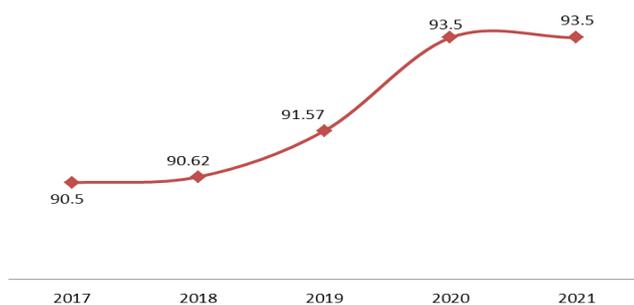
Gambar 1. Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2017-2021



Sumber: Kemlu 2021, diolah.

Sedangkan capaian indeks perlindungan WNI di luar negeri terus mengalami peningkatan dari 90,5% pada 2017 menjadi 93,5% pada 2021. Rata-rata capaian indeks perlindungan sebesar 91,94%.

Gambar 2. Capaian Indeks Perlindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2017-2021



Sumber: Kemlu 2021, diolah.

Kendala Perlindungan WNI di Luar Negeri

Permasalahan WNI di luar negeri relatif cukup kompleks dan beragam. Kemlu merilis berbagai macam permasalahan/kasus WNI di luar negeri antara lain mencakup kasus keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan, tindak pidana dan perdata serta Covid-19 hingga sekarang.

Kasus PMI dan ABK kapal ikan menjadi jenis kasus terbesar. Diikuti selanjutnya oleh kasus keimigrasian, ketenagakerjaan, Covid-19 dan pidana. Kasus ketenagakerjaan misalnya masih terdapat WNI yang di-PHK sepihak, gaji yang tidak dibayarkan atau dipotong, penelantaran oleh pemberi kerja hingga ketidakjelasan pemulangan bagi mereka yang sudah selesai kontrak kerja.

Pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian kasus-kasus WNI di luar negeri, namun, masih saja ditemukan kendala teknis dalam prosesnya. Sehingga penyelesaian kasus

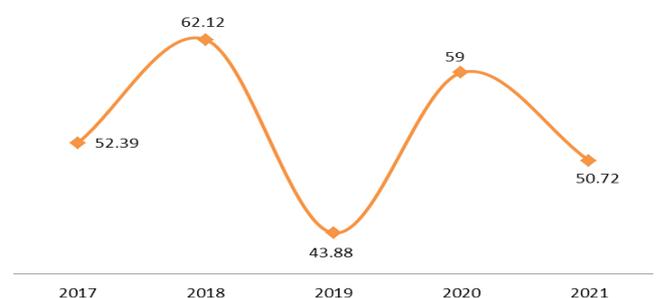
tersebut ditempuh dengan upaya pendekatan personal kepada pihak terkait. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat dalam perlindungan WNI di luar negeri antara lain: 1) Kebijakan pemerintah negara asing yang menghambat proses penyelesaian kasus, ketersediaan alat bukti, saksi, dokumen di negara asing dan di Indonesia, 2) Masih terbatasnya moda transportasi repatriasi, 3) Perbedaan sistem hukum dan peradilan negara asing, 4) Sistem informasi yang dimiliki Kemlu masih belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses perumusan kebijakan.

Dukungan Anggaran Relatif Kecil?

Dukungan anggaran untuk program perlindungan WNI di luar negeri berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Alokasi anggaran tertinggi diperoleh pada 2018 sebesar Rp62,12 miliar. Dan terendah sebesar Rp43,88 miliar. Secara rata-rata, alokasi anggaran untuk perlindungan WNI di luar negeri tumbuh minus 0,8% per tahun.

Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Kemlu pertahun, maka untuk satu kasus mendapatkan alokasi anggaran rata-rata Rp3,1 juta per tahun. Apakah jumlah tersebut relatif cukup? Data dari Kemlu pada 2021 ditemukan fakta bahwa ada sekitar 2.188 kasus yang tidak tertangani. Mungkin saja banyak faktor yang melatarbelakanginya. Namun, jika per kasus hanya mendapat alokasi anggaran tidak lebih dari Rp4 juta bagaimana perlindungan terhadap WNI di luar negeri akan maksimal? Misalkan saja kasus kematian atau pendampingan hukum bagi WNI yang sedang berperkar di luar negeri. Apakah anggaran pemulangan jenazah cukup memadai? Bagaimana Kemlu dapat menyewa pengacara? Menurut hemat kami, alokasi anggaran untuk perlindungan WNI relatif masih kecil.

Gambar 3. Realisasi Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Periode 2017-2021



Sumber: Ditjen Perlindungan WNI Kemlu 2021, diolah

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengendalian Inflasi

HIGHLIGHT

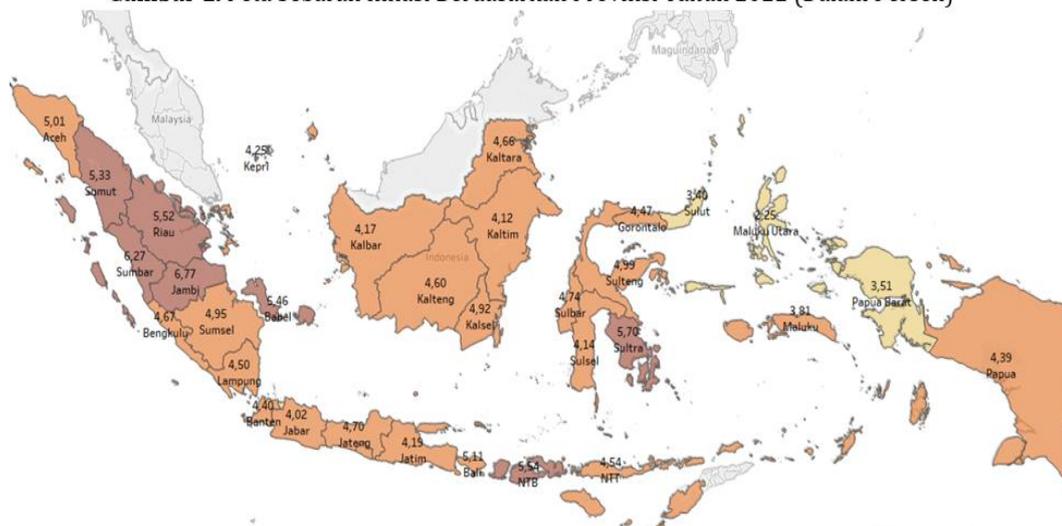
- Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara *year to date* (ytd) telah mencapai 3,8%, atau tertinggi sejak tahun 2015.
- Di lihat dari perkembangan inflasi per provinsi hingga Juli 2022 ini, sebanyak 30 provinsi berada diatas rata-rata inflasi nasional. Sementara hanya terdapat 4 provinsi dengan tingkat inflasi di bawah rata-rata nasional.
- Tiga provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di antaranya Provinsi Jambi (6,8%), Sumatera Barat (6,3%), dan Sulawesi Tenggara (5,7%).
- Adapun 4 provinsi dengan inflasi terendah hingga Juli 2022 di antaranya Maluku Utara (2,3%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (3,4%), dan Papua Barat (3,5%).

Kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) menjadi salah satu variabel makro ekonomi penting yang memengaruhi kondisi perekonomian. Hingga Juli 2022, tren inflasi Indonesia secara *year to date* (ytd) telah meningkat tinggi, bahkan tertinggi sejak tahun 2014 lalu. Inflasi nasional hingga Juli 2022 sebesar 3,8%, dan berpotensi terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Sementara rata-rata inflasi Indonesia sejak 2015 selalu terjaga dibawah 3,65%.

Dilihat dari komponen pembentuknya, lonjakan inflasi secara nasional diakibatkan oleh inflasi barang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,24% dan 5,13%. Kenaikan bahan kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, daging sapi, hingga kenaikan harga pupuk, dan kenaikan harga pakan ternak, menjadi faktor terbesar penyumbang kenaikan harga pada tahun 2022 ini. Selain itu, kenaikan bahan baku makanan impor seperti tepung terigu dan gandum juga mendorong kenaikan inflasi pada tahun 2022. Selain bahan makanan, kenaikan harga bahan bakar minyak, dan tarif dasar listrik juga memengaruhi laju inflasi di tahun 2022 ini.

Sementara dilihat dari perkembangan inflasi per provinsi hingga Juli 2022 ini, sebanyak 30 provinsi berada di atas rata-rata inflasi nasional. Sementara hanya terdapat 4 provinsi dengan tingkat inflasi di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di antaranya Provinsi Jambi (6,8%), Sumatera Barat (6,3%), dan Sulawesi Tenggara (5,7%). Adapun 4 provinsi dengan inflasi terendah hingga Juli 2022 di antaranya Maluku Utara (2,3%), DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (3,4%), dan Papua Barat (3,5%).

Gambar 1. Peta Sebaran Inflasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 (Dalam Persen)



*Data perkembangan inflasi *Year to Date* Juli 2022

Sumber: BPS, diolah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Riza Aditya Syafri

Penulis: Riza Aditya Syafri · Rendy Alvaro



Dari ketiga daerah dengan inflasi tertinggi hingga Juli 2022 (Jambi, Sumbar, dan Sultra), apabila ditinjau lebih jauh karakteristik perekonomiannya, di dapati bahwa sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebenarnya menjadi sektor unggulan pada ketiga provinsi tersebut, dengan rata-rata proporsi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di atas 20% terhadap total PDRB masing-masing provinsi, dan menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di ketiga provinsi tersebut.

Merujuk pada faktor penyebab inflasi pada tahun 2022 yang didominasi oleh faktor makanan (bawang putih, bawang merah, cabai, dan lainnya), maka seharusnya daerah yang ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan mampu menjaga tingkat inflasi daerahnya pada level rendah. Hanya saja, jika dilihat dari jenis produk yang dihasilkan, sebagian besar daerah pertanian di Indonesia masih bertumpu pada 1 atau 2 produk hasil pertanian, serta kurang memperhatikan adanya diversifikasi produk.

Sebagai contoh, di Provinsi Jambi, proporsi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan terhadap PDRB Provinsi Jambi secara rata-rata mencapai 31,33% pada tahun 2022. Namun dari proporsi tersebut, 67% disumbangkan dari tanaman perkebunan. Sementara tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai) hanya menyumbangkan rata-rata sebesar 11,2%. Adapun peternakan, hanya menyumbangkan proporsi rata-rata sekitar 4,3% terhadap total PDRB sektor pertanian.

Diversifikasi produk hasil pertanian menjadi hal yang penting dilakukan oleh setiap daerah untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan harga, terutama yang disebabkan oleh bahan makanan. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan *supply-demand* terhadap bahan makanan yang diperlukan di daerahnya, serta memastikan aliran distribusi terhadap bahan makanan tersebut dapat terdistribusi secara normal.

Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian dan Peran APBN Sebagai Stimulus

Terjadinya inflasi, tanpa diikuti adanya kenaikan lapangan pekerjaan/pendapatan masyarakat, akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya, menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka kemiskinan secara nasional.

APBN dapat menjadi *buffer* untuk mencegah menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Kebijakan pragmatis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan inflasi diantaranya dengan melanjutkan dan memperhatikan penyaluran terhadap berbagai program perlindungan sosial.

Pada tahun 2022 ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial melalui APBN sebesar Rp246,13 triliun dalam bentuk berbagai program perlindungan sosial. Di samping itu, pemerintah daerah melalui APBD juga menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp11,35 triliun dalam bentuk belanja bantuan sosial. Selain itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40% dari dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dengan kata lain sebesar Rp27,2 triliun dari total dana desa pada tahun 2022.

Namun, untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari inflasi, pemerintah terutama melalui Kemendagri perlu mendorong untuk: (I) mempercepat koordinasi dengan pemda dan Kemensos dalam memutakhirkan data DTKS untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran; (II) memastikan ketepatan waktu pemberian bantuan agar bantuan diterima di saat yang dibutuhkan; (III) meningkatkan koordinasi pemda dengan Tim Pengendali Inflasi di Daerah (TPID); (IV) menjaga *supply-demand* komponen yang menyumbangkan inflasi terbesar, melalui pengembangan sistem yang terintegrasi.

Masihkah Diperlukan Reformasi dalam Tubuh Polri?

HIGHLIGHT

- Meski reformasi Polri sebagian besar sudah dijalankan pada aspek struktural dan instrumental, budaya kekerasan masih ada di dalam tubuh Polri.
- Adanya unit non-struktural ini menyebabkan tidak adanya kontrol antar badan di lingkungan Polri.
- Pemerintah perlu menertibkan keberadaan unit-unit non-struktural di tubuh Polri.
- Guna menjalankan tugas dan tanggung jawab besar ini, Polri memerlukan sumber daya manusia yang kredibel dan sistem kontrol baik dari dalam institusi ataupun di luar institusi Polri.
- Alokasi anggaran Polri menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2008. Alokasi anggaran di tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 5 kali lipat anggaran Polri di tahun 2008.

Kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada awal Juli 2022 masih menyisakan misteri hingga saat ini. Mencuatnya kasus pembunuhan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap citra Polri. Hal ini terlihat dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri selama kasus ini bergulir.

Inteligen Media Manajemen Polri menyatakan bahwa pada periode Januari-Juni 2022 kepercayaan publik terhadap Polri di media memiliki skor rata-rata sebesar 76%. Namun, kepercayaan publik menurun secara drastis karena mencuatnya kasus pembunuhan di Duren Tiga. Adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua memantik adanya seruan untuk melakukan reformasi di dalam tubuh Polri.

Budaya Kekerasan Polisi

Kasus pembunuhan Brigadir Yoshua oleh rekannya sesama polisi dan atasannya, menjadi salah satu bukti bahwa budaya kekerasan masih ada dalam tubuh Polri. Selain ini, pada 13 Februari 2022, seorang pria tewas ditembak oleh Polisi yang membubarkan demonstrasi aktivitas penolakan tambang di Kec. Kasimbar dan Tinombo Selatan. Tiga tahun lalu, terjadi kasus penembakan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, saat melakukan unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Kendarai Sulawesi Tenggara.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa sedikitnya ada 677 kasus kekerasan Polisi sepanjang Juni 2021 hingga 2022. Kekerasan ini telah memakan 928 korban terluka dan 59 orang tewas.

Prof. Adrianus juga menyatakan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi menjadi model dan budaya di internal kepolisian. Peristiwa itu tidak bisa lagi hanya disebut sebagai perbuatan oknum. *Culture abuse* yang sekarang ada mungkin sudah menjadi turunan dari senior kepada junior. Meski reformasi Polri sebagian besar sudah dijalankan pada aspek struktural dan instrumental, tapi masih ada persoalan laten terkait kultur ini.

Kultur kekerasan polisi timbul dan tumbuh karena adanya impunitas bagi pelaku kekerasan. Guna menghilangkan kultur ini tidak cukup hanya menetapkan pelaku tindak pidana dalam Polri sebagai tersangka. Namun sebuah mekanisme baru diperlukan guna memutus rantai kekerasan dalam kultur Korps Bayangkara. Prof Adrianus juga menyatakan bahwa perlu adanya penguatan regulasi, penegakan kode etik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ratna Christianingrum · Leo Iskandar

Penghapusan unit non-struktural

Seiring dengan perkembangan Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua, mencuat adanya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Satgasus Merah Putih merupakan jabatan non-struktural di dalam Polri. Satgasus Merah Putih ini dibentuk oleh Jenderal Tito Karnavian pada Tahun 2017.

Adapun tugas dan fungsi Satgasus Merah Putih sebagaimana tertera dalam surat perintah (sprin) nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019, di antaranya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi perhatian pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Satuan Tugas ini juga bertugas menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, narkoba, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

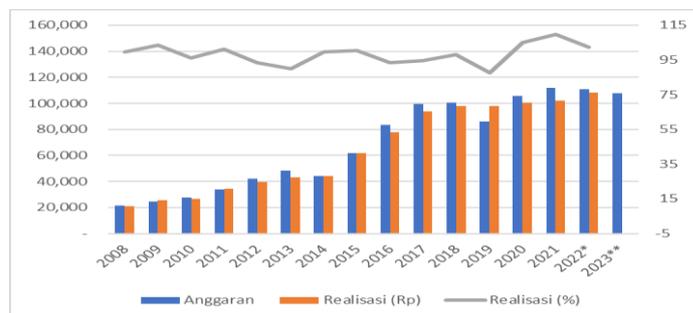
Berdasarkan Surat perintah tersebut, Satgasus Merah Putih berhasil mengungkap sejumlah kasus-kasus besar di tanah Air. Seperti peristiwa 411 atau demonstrasi 4 November 2016, dan sejumlah penyelundupan narkoba dalam jumlah besar. Namun prestasi yang ditorehkan oleh unit non-struktural ini secara tidak langsung menjadikan unit ini sebagai pusaran kekuasaan. Apabila pusaran kekuasaan ini digunakan dengan baik, maka akan mampu meningkatkan kinerja dan prestasi Polri itu sendiri. Namun apabila pusaran kekuasaan ini digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan kerusakan pada citra Polri.

Adanya unit non-struktural ini menyebabkan tidak adanya kontrol antar badan di lingkungan Polri. Tanpa adanya kontrol, menyebabkan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang semakin besar. Sehingga Pemerintah perlu menertibkan keberadaan unit-unit non-struktural di tubuh Polri.

Anggaran Polri

Alokasi anggaran Polri menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2008. Alokasi anggaran di tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 5 kali lipat anggaran Polri di tahun 2008. Besaran anggaran ini disertai dengan tingginya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh institusi ini. Polri memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Terlebih lagi dimasa pemulihan ekonomi, stabilitas keamanan nasional menjadi kebutuhan.

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Polri (dalam miliar rupiah)



Sumber: Kemenkeu, 2022 (diolah)

Saat ini Polri perlu mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan mitigasi perkembangan harga kebutuhan pokok, melakukan redistribusi kebutuhan pokok ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan rantai logistik.

Guna menjalankan tugas besar ini, Polri memerlukan sumber daya manusia yang kredibel dan sistem kontrol baik dari dalam institusi ataupun di luar institusi Polri. Pengawasan ini diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas institusi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga reformasi di dalam tubuh Polri perlu terus dilanjutkan.

Prof Adrianus berpendapat bahwa terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini, yaitu penanganan kasus pelanggaran hukum, penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil, dan keterlibatan dalam aksi kekerasan dalam masyarakat.